

PENETAPAN HARGA SEORANG POLITISI: Suatu Kajian Teoritis

Armand Sudiyono

Pascasarjana Program Magister Agribisnis
Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract

Reform movements that have occurred since the collapse of the New Order regime in 1998 of which is characterized by direct elections (presidential and local elections) and legislators, based on the principle of representation and expansion of monitoring compliance. But ironically, direct elections would bring the phenomenon of over-valued pricing politicians. A acceptance is done illegally by politicians should be borne by the public constituency. A acceptance is done illegally uses the mode of corruption, collusion and nepotism. The phenomenon that occurs in this reform era is an interesting study materials. The questions that need to be answered include: How much does a decent price for politicians?; How politicians pricing model?; How the steps to her normal-profit a politician? This study is a preliminary study to answer the third issue.

LATAR BELAKANG

”.... Wong waras lan adil uripe nggagas lan kepencil. Sing ora biso maling podho digething. Sing pinter duroko podho dadi konco. Wong bener soyo thenger-thenger, wong salah soyo bungah-bungah. Begjane sing eling, begjane sing lali, nanging isih begja sing waspodho”
Sunan Giri Perapen, 1618

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara peran politik mengalami pasang-surut dari waktu ke waktu. Politik dimaknai bermacam-macam. Salah satunya dikemukakan Coser et al. (1987): ”Politics as process of deciding *‘who gets what, when and how’*”. Politisi merupakan orang yang mengamalkan proses ini. Politisi ini dapat meliputi anggota legeslatif maupun eksekutif. Badan legeslatif dapat berupa DPRD, DPR dan DPD, sedangkan eksekutif meliputi bupati/ walikota, gubernur dan presiden, dimana semua dipilih berdasarkan prinsip ‘one man, one vote’ oleh rakyat. Dengan menerapkan proses tersebut sebenarnya politisi ingin mempunyai ‘kekuasaan’ (*power*), yaitu kemampuan untuk menguasai sumberdaya yang terbatas atau menentukan bagaimana orang-orang lain mau bertindak sesuai dengan kemauannya.

Pada masa tertentu politik dapat menjadi panglima pembangunan nasional, pada masa lain terbalik. Dalam perkembangan sejarah Indonesia pada awalnya politik dapat dianggap sebagai cara untuk mencapai kemerdekaan. Politisi mendirikan partai politik atau pun organisasi berusaha mencapai kemerdekaan. Politisi sebelum menikmati hasil kerja, baik sebagai anggota legeslatif maupun eksekutif banyak yang ditangkapi dan ditahan, bahkan diasingkan. Politisi periode ini bekerja dilandasi idealisme, baik politik aliran maupun kebangsaan, semua berorientasi pada kemerdekaan. Kondisi ini berlangsung sampai pada akhir Orde Lama paruh kedua tahun 1960-an. Jika ditinjau dari aspek ekonomi penerimaan total (TR) yang diterima mungkin jauh lebih kecil dibanding dengan biaya total (TC) yang harus dikeluarkan. Biaya total ini tidak hanya pengeluaran materi saja, tetapi juga nyawa dan kesengsaraan yang diderita keluarga politisi selama ditahan, diasingkan bahkan ditinggal selama-lamanya. Politisi memperoleh kekuasaan setelah ditahan atau diasingkan.

Pada masa Orde Baru ekonomi menjadi panglima pembangunan yang tercermin pada Trilogi Pembangunan, dimana politik pada awalnya merupakan aspek pelengkap saja. Trilogi Pembangunan merupakan doktrin pembangunan yang berisi pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pada awal Orde Baru pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas pembangunan, semua kegiatan harus menyelaraskan dengan pertumbuhan ekonomi. Aspek politik dikontrol atas nama stabilitas nasional, melalui penyederhanaan partai politik dan bangunan 'pseudo-democracy' yang monoloyalitas Golkar dengan pilar jalur ABG, yaitu: ABRI, Birokrasi dan Golongan. Politisi kritis dimarjinalkan, bahkan embrio politisi kritis didormansikan. Partai-partai disederhanakan. Partai-partai berasaskan Islam difusikan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai-partai berasaskan nasionalis dan nasrani difusikan dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Proses politik yang ada didominasi Golkar, sedangkan PPP dan PDI hanya sebagai aksesoris demokrasi saja. Pada tahun 1984 semua organisasi sosial dan organisasi politik dipaksa menerima asas tunggal Pancasila menurut tafsir penguasa. Peran pemerintah pusat sangat dominan, tidak saja dalam mengatur jajaran eksekutif, tetapi juga dalam menentukan anggota legeslatif. Bupati, walikota dan Gubernur pada umumnya berasal dari militer atas nama Dwi fungsi ABRI, hanya daerah-daerah tertentu yang memiliki lembaga eksekutif berasal dari sipil. Lembaga legeslatif tidak ubahnya sebagai 'lembaga setuju' artinya keputusan sudah *clear* sebelum palu diketukkan ketua sidang. Pada

Penetapan Harga Seorang Politisi

masa Orde Baru pengambilan keputusan dilakukan Pemerintah Pusat, sedangkan pemerintah daerah, baik Pemerintah Daerah Tingkat I (sekarang: pemerintah propinsi) dan Pemerintah Daerah Tingkat II (sekarang, pemerintah kabupaten/ kota) harus menyesuaikan dengan pemerintah pusat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dikontrol oleh pemerintah pusat. Penerimaan politisi disetarakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), meskipun demikian biaya proses berpolitik sangat murah. Calon anggota legeslatif ditentukan DPP masing-masing partai, padahal masing-masing partai dikendalikan pemerintah. Politisi kritis ditahan dengan tuduhan penghinaan terhadap kepala negara dan stabilitas nasional. Jika PPP atau PDI ingin kritis, maka diintervensi pemerintah melalui muktamar luar biasa atau pun kongres luar biasa. Kedua proses politik ini akan menghasilkan Ketua Umum boneka, yang dapat dikendalikan pemerintah. Dalam kondisi yang demikian ini terjadi keseimbangan, yaitu politisi mencapai keuntungan normal. Dengan kata lain penerimaan total (TR) sebanding dengan biaya total (TC).

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998 menjadi pertanda Indonesia memasuki Orde Reformasi. Gerakan mahasiswa, intelektual dan lembaga swadaya masyarakat mendapat dukungan oleh masyarakat luas yang sementara ini terdiam (*silent majority*) yang takut masa lalu atau kesalahan generasi-generasi sebelumnya. Ekonomi sebagai panglima pembangunan jatuh berbarengan dengan krisis multidimensi yang tidak dapat diatasi pemerintah Orde Baru. Euforia reformasi menyebabkan terjadinya dekonstruksi bangunan Orde Baru dan kita lupa melakukan rekonstruksi kembali. Politik menjadi panglima pembangunan. Politisi yang sebelumnya dikuyo-kuyo menjadi pahlawan, yang pecundang jadi pemenang. Aspek kelembagaan belum tertata dan tuntutan otonomi yang gencar menyebabkan perilaku aji mumpung dan menyimpang politisi menjadi-jadi. Penetapan gaji tinggi dan insentif yang tidak terkontrol menyebabkan penerimaan total (TR) politisi jauh lebih besar dibanding dengan biaya total (TC) yang harus dikeluarkan atau terjadi keuntungan super normal. Berbeda dengan era Orde Lama maupun Orde Baru, maka pada Orde Reformasi politisi menjabat (baca: berkuasa) terlebih dahulu, baik sebagai anggota legeslatif maupun eksekutif, setelah itu diseret ke pengadilan kejaksaan atau pun KPK. Dengan memperhatikan fenomena terakhir ini, maka perlu dikaji secara teoritis.

- Berapa harga yang layak bagi seorang politisi di Indonesia?
- Bagaimana model penentuan harga bagi seorang politisi?

- Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk *me-normal-profit*-kan keuntungan politisi?

ANALISIS GRAFIK DAN MATEMATIK PENENTUAN HARGA SEORANG POLITISI

Varian (1992) mengakui bahwa ilmu ekonomi dapat digunakan untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang akan memperbaiki kehidupan masyarakat. Dengan memperhatikan definisi politik pada bagian sebelumnya, analisis ilmu ekonomi, baik berupa analisis grafik maupun matematik, dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa seorang politisi bersedia mengeluarkan biaya proses berpolitik yang jauh lebih besar dibanding dengan penerimaan totalnya. Varian (1992) lebih lanjut menjelaskan ilmu ekonomi memberikan kerangka pikir guna menghitung dan mengkuantitatifkan hubungan-hubungan ekonomi dari seorang politisi. Dengan perilaku rasional, tentu seseorang akan melakukan pilihan, apabila penerimaan total minimal seimbang dengan biaya total. Pada awal Orde Reformasi sering terungkap pernyataan dari kalangan politisi: "Jika ingin kaya, jadilah politisi". Padahal untuk menjadi anggota DPR diperlukan biaya Rp 2 milyar sampai Rp 5 milyar; bupati atau walikota Rp 5 milyar sampai Rp 12 milyar dan gubernur mencapai ratusan milyar. Jika mengacu pada biaya yang harus dikeluarkan politisi dengan penerimaan resmi, tidaklah cukup memberikan insentif bagi seseorang memasuki dunia politik.

Penetapan harga digunakan untuk menganalisis, apakah seorang politisi menderita kerugian, impas ataukah menikmati keuntungan. Tahap awal analisis diasumsikan pasar politisi di Indonesia beroperasi pada struktur pasar persaingan sempurna. Politisi secara ekonomi dapat dipandang sebagai entiti yang menjual jasa, baik sebagai anggota legeslatif maupun eksekutif. Pada struktur pasar persaingan sempurna tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar artinya setiap orang yang memenuhi syarat dapat menjadi politisi, jumlah calon politisi dan pemilih banyak, jasa yang ditawarkan sejenis dan struktur biaya penerimaan politisi diketahui.

Penetapan harga (*pricing*) diturunkan dari fungsi keuntungan, yaitu dapat dinyatakan

$$\pi = TR - TC \dots\dots\dots (1)$$

- dimana π = Keuntungan total .
- TR = Penerimaan total .
- TC = Biaya total .

Penetapan Harga Seorang Politisi

Penerimaan total dapat dinyatakan dengan fungsi penerimaan total

$$TR = P \cdot Q \quad \dots\dots\dots (2)$$

- dimana TR = Penerimaan total .
- P = Harga output per unit
- Q = Jumlah output total .

Biaya total merupakan hasil kali antara biaya rata-rata dengan jumlah output total, sehingga biaya total dapat dinyatakan dengan

$$TC = AC \cdot Q \quad \dots\dots\dots (3)$$

- dimana TC = Biaya total .
- AC = biaya rata-rata
- Q = Jumlah output total .

Dengan mensubstitusikan persamaan (2) dan (3) kedalam persamaan (1), maka diperoleh fungsi keuntungan

$$\pi = (P - AC)Q \quad \dots\dots\dots (4)$$

Politisi dalam posisi keseimbangan apabila keuntungan marjinal sama dengan nol atau $\partial\pi/\partial Q = 0$ (*FOC = First Order Condition*) dan $\partial^2\pi/\partial Q^2 < 0$ (*SOC = Second Order Condition*). Dengan menderivasikan persamaan (1) akan diperoleh

$$\partial\pi/\partial Q = \partial TR/\partial Q - \partial TC/\partial Q = 0 \quad \dots (5)$$

$$\partial\pi/\partial Q = \text{keuntungan marjinal}$$

$$\partial TR/\partial Q = \text{penerimaan marjinal} = MR \text{ (Marginal Revenue)}$$

$$\partial TC/\partial Q = \text{biaya marjinal} = MC \text{ (Marginal Cost)}$$

Oleh karena keuntungan maksimum tercapai pada saat keuntungan marjinal sama dengan nol, maka persamaan (5) dapat dinyatakan sebagai

$$MR = MC \quad \dots\dots\dots (6)$$

Dari persamaan (6) di atas dapat dinyatakan bahwa keseimbangan politisi tercapai pada saat penerimaan marjinal (MR) politis sama dengan biaya marjinal (MC) yang dikeluarkan. Pada struktur pasar persaingan sempurna, penerimaan marjinal (MR) ini sama dengan harga politisi. Dengan menderivasikan penerimaan total persamaan (2), maka penerimaan marjinal politisi sebesar

$$\partial TR/\partial Q = P \cdot \partial Q/\partial Q + Q \cdot \partial P/\partial Q \quad \dots\dots (7)$$

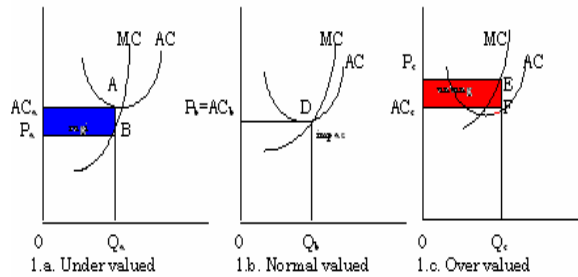
Oleh karena $\partial P/\partial Q = 0$, maka persamaan (7) dapat dinyatakan

$$\partial TR/\partial Q = P \cdot \partial Q/\partial Q$$

$$\text{atau } MR = P$$

Pada pasar persaingan sempurna dapat dinyatakan keseimbangan politisi tercapai pada saat $MC = MR = P$. Pada pasar bersaing tidak sempurna, penerimaan marjinal ini tidak sama dengan harga output, sehingga keseimbangan politisi tercapai pada saat $MC = MR$.

Pada pasar persaingan sempurna keseimbangan politisi tercapai pada saat biaya marjinal sama dengan penerimaan marjinal atau harga ($MC = MR = P$) yang secara grafik dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Penentuan harga bagi seorang politisi. Kondisi *under valued* terjadi pada saat harga P ditetapkan lebih rendah daripada biaya rata-rata proses berpolitik AC^a, sehingga politisi menderita kerugian sebesar P AC AB. Kondisi *normal valued* terjadi jika harga sama dengan biaya rata-rata proses berpolitik (P = AC^a), pada kondisi yang demikian ini politisi mencapai titik impas^b atau keuntungan normal. Kondisi *over valued* terjadi pada saat harga P ditetapkan jauh lebih tinggi daripada biaya rata-rata proses berpolitik AC^c, sehingga politisi menikmati keuntungan sebesar P AC^c EF atau terjadi keuntungan super normal.

Ada tiga keseimbangan politisi yang mungkin terjadi sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1. Gambar 1.a. menjelaskan kondisi *under valued*, artinya politisi dihargai lebih rendah daripada harga yang seharusnya. Biaya rata-rata dalam proses berpolitik sebesar AC^a dan politisi dihargai sebesar P sehingga dengan

Penetapan Harga Seorang Politisi

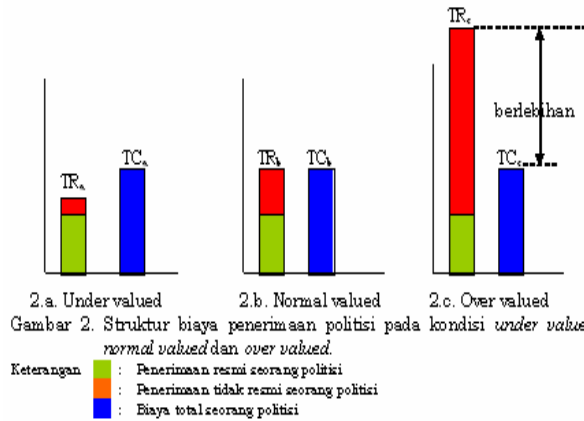
menggunakan persamaan (4) diperoleh keuntungan sebesar $\pi = (P - AC)Q$. Oleh karena $P < AC$, maka keuntungan politisi bertanda negatif. Dengan kata lain politisi mengalami kerugian sebesar $P - AC$. Kondisi *under valued* secara ekonomi merupakan disinsentif bagi politisi untuk memasuki dunia politik.

Kondisi *normal valued* dijelaskan dengan Gambar 1.b. yang menunjukkan penetapan harga politisi sama dengan biaya rata-rata berpolitik. Dalam kondisi *normal valued*, biaya rata-rata dalam proses berpolitik sebesar AC dan politisi dihargai sebesar P . Keuntungan politisi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (4), yaitu sebesar $\pi = (P - AC)Q = 0$, karena $P = AC$. Kondisi ini disebut titik impas atau keuntungan normal. Dalam keuntungan normal ini sudah diperhitungkan seluruh biaya, termasuk biaya implisit dan keuntungan yang wajar. Titik impas atau keuntungan normal seharusnya merupakan keseimbangan jangka panjang pada dunia politik, artinya jika harga ditetapkan terlalu tinggi (*over valued*) akan terjadi insentif yang menyebabkan orang berbondong-bondong memasuki dunia politik dan sebaliknya jika harga ditetapkan terlalu rendah (*under valued*) akan terjadi disinsentif yang menyebabkan orang enggan berpolitik.

Kondisi *over valued* dijelaskan dengan Gambar 1.c. artinya politisi dihargai jauh lebih tinggi daripada harga yang seharusnya. Biaya rata-rata dalam proses berpolitik sebesar AC dan politisi dihargai sebesar P . Kondisi dengan menggunakan persamaan (4) dapat dihitung besar keuntungan politisi $\pi = (P - AC)Q$. Oleh karena $P > AC$, maka keuntungan politisi bertanda positif. Dengan demikian politisi menikmati keuntungan sebesar $P - AC$. Kondisi *over valued* secara ekonomi merupakan insentif bagi warga negara untuk memasuki dunia politik. Kondisi praktik Indonesia saat ini mungkin dapat digambarkan seperti ini, meskipun penerimaan resmi sebagai politisi baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif relatif kecil, tetapi sangat menarik minat anggota masyarakat untuk memasuki dunia politik. Dengan membandingkan antara biaya total dengan penerimaan total, tentu penerimaan tidak resmi yang menyebabkan terjadinya keuntungan super normal. Dengan menganggap perilaku politisi rasional, tentu biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses politik ini harus dapat dikembalikan beserta 'bunganya' selama menjabat, baik sebagai eksekutif maupun anggota legislatif.

Dengan mendisagregasi penerimaan total (TR) menjadi penerimaan resmi (TR_r) dan penerimaan tidak resmi (TR_{tr}), maka menggunakan gambar poligon,

struktur biaya penerimaan politisi pada kondisi *under valued*, *normal valued* dan *over valued* dapat diilustrasikan sebagai Gambar 2.



Pada kondisi *under valued* dan *normal valued*, maksimal penerimaan total politisi, baik yang berasal dari penerimaan resmi (TR_r) maupun penerimaan tidak resmi (TR_{tr}) sama dengan biaya total (TC) atau secara matematika dapat dinyatakan dengan

$$TR_r + TR_{tr} \leq TC \dots\dots\dots (8)$$

Tetapi pada kondisi *over valued*, penerimaan total politisi, baik yang berasal dari penerimaan resmi (TR_r) maupun penerimaan tidak resmi (TR_{tr}) jauh melebihi biaya total (TC), sehingga terjadi keuntungan *super normal* yang dapat dinyatakan dengan persamaan

$$TR_r + TR_{tr} \gg TC \dots\dots\dots (9)$$

Kondisi *over valued* yang menghasilkan keuntungan super normal sangat tidak menyehatkan bagi perkembangan hidup berbangsa dan bernegara. Pemilihan langsung eksekutif maupun anggota-anggota legeslatif yang semula didesain agar biaya berdemokrasi lebih murah, mengutamakan prinsip keterwakilan dan mekanisme pengawqasan, justru memunculkan 'investor-investor' politik yang menanamkan modalnya dengan harapan memperoleh penerimaan yang jauh lebih banyak dibandingkan modal yang ditanamkan. Selain itu adanya kesediaan calon eksekutif dan calon legeslatif untuk berpartisipasi secara finansial dalam proses politik menyebabkan ada-nya 'hidden price' yang harus dibayar masyarakat dalam bentuk penerimaan-penerimaan

tidak resmi, yang pada akhirnya membebani anggaran pembangunan. Untuk memperbaiki kondisi ini diperlukan langkah-langkah guna *me-normal-profitkan* politisi, sehingga politik dapat berperan untuk memecahkan masalah pembangunan.

MODEL PENENTUAN HARGA SEORANG POLITISI

Dalam kajian ini, model didefinisikan sebagai abstraksi matematik fenomena-fenomena proses berpolitik dari seorang politisi, sehingga dapat dijelaskan mengapa seseorang bersedia masuk ke dunia politik. Meskipun, jika ditelaah dari penerimaan resmi lebih kecil dibanding biaya total, tentu fenomena masih banyaknya anggota masyarakat yang ingin memasuki dunia politik mengindikasikan adanya penerimaan tidak resmi yang cukup besar yang memungkinkan terjadinya keuntungan super normal. Keuntungan super normal yang berasal dari proses politik yang bersifat KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Proses politik yang bersifat KKN dapat terjadi, apabila terdapat hasrat atau keinginan pelaku-pelakunya dan kesempatan melakukan KKN.

Kesempatan melakukan KKN pada umumnya terbuka pada pemerintahan transisi dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi yang diikuti perubahan strategi pembangunan. Selama perjalanan sepuluh tahun pemerintahan Orde Reformasi dapat diperbandingkan antara strategi pembangunan Orde Baru dan Orde Reformasi. Komparasi pilihan strategi pembangunan Orde Baru dan Orde Reformasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 : Komparasi pilihan strategi pembangunan Orde Baru dan Orde Reformasi

No.	Instrumen Strategi	Orde Baru	Orde Reformasi
1.	Pemerintahan	Sentralistis	Desentralistis
2.	Pendekatan pembangunan	Top down merupakan pendekatan general	Top down untuk safety net dan Bottom up untuk empowerment
3.	Mekanisme kekuasaan	Security approach	Humanistic, democratic dan welfare approach
4.	Peran relatif pemerintah	Pemerintah dominan	Pemerintah dan masyarakat
5.	Sektor dominan	Pertanian dan pertambangan	Broad base sector
6.	Landasan perencanaan	Sektoral komoditi	Bertumpu pada kemampuan lokal
7.	Sasaran pembangunan	Pertumbuhan	Pemerataan dan sustainabilitas

Sumber : Sudiyono, 2008.

Keterangan : Komparasi berdasarkan perilaku politik pemerintah dan tuntutan masyarakat setelah runtuhnya Pemerintahan Suharto.

Dengan memperhatikan tabel di atas terlihat bahwa Orde Baru menerapkan pemerintahan sentralistis, sehingga perencanaan pembangunan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelengkap pemerintah pusat. Pada Orde Reformasi tuntutan otonomi pemerintahan daerah menyebabkan perubahan strategi ke arah desentralistis, khususnya perimbangan pendapatan pusat-daerah. Dengan adanya kecenderungan perubahan ini dinyatakan terjadi pergeseran korupsi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pendekatan pembangunan pada Orde Baru menggunakan pendekatan general yang bersifat *top down*, sebaliknya pendekatan pembangunan yang digunakan Orde Reformasi hanya bersifat *top down* untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), sedangkan pendekatan pembangunan untuk pemberdayaan (*empowerment*) bersifat *bottom up*. Mekanisme kekuasaan pada Orde Baru bersifat *security approach* yang menempatkan pemerintah dan militer di atas segala-galanya, politisi kritis dianggap membahayakan kehidupan kenegaraan. Dalam pembangunan peran pemerintah sangat dominan sekali dan sebaliknya rakyat dimobilisasi atas nama pembangunan. Pada Orde Reformasi mekanisme kekuasaan diusahakan bersifat *humanistic, democratic* dan memanfaatkan *welfare approach* serta peran rakyat sudah mulai ditumbuhkan. Pemerintah Orde Baru memanfaatkan sektor pertanian dan pertambangan sebagai sektor dominan dan sebaliknya pemerintah Orde Reformasi sektor dominan meluas (*broad base sector*) yang bertumpu pada kemampuan lokal. Sasaran pembangunan pada pemerintah Orde Baru adalah pertumbuhan dan sebaliknya pada pemerintah Orde Reformasi sasaran pembangunan adalah pemerataan dan sustainabilitas.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan di atas, perlu dikaji lebih lanjut kaitan praktik politik yang bersifat KKN dengan perubahan strategi pembangunan ini. Jika ditinjau dari praktik pelaksanaan pemerintahan anggaran pembangunan dikelompokkan menjadi anggaran belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anggaran belanja pemerintah pusat diserahkan dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP) kepada Menteri Keuangan, sedangkan anggaran pembangunan pemerintah daerah diserahkan kepada Gubernur. Oleh gubernur anggaran ini selain didistribusikan untuk anggaran pemerintah propinsi, juga didistribusikan pada masing-masing bupati atau walikota yang berada pada wilayah kekuasaannya. Realisasi DIP pemerintah daerah ini didasarkan pada usulan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, baik untuk

Penetapan Harga Seorang Politisi

pemerintah propinsi maupun pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Lembaga legeslatif, baik DPR maupun DPRD selain melakukan fungsi anggaran ini juga melakukan fungsi legeslasi dan pengawasan. Fungsi legeslasi, yaitu penyusunan perundang-undangan atau peraturan, baik atas usul pemerintah, organisasi profesi maupun atas inisiatif lembaga legeslatif itu sendiri. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai anggaran pembangunan berdasarkan program-program yang disusun eksekutif dan disetujui lembaga legeslatif.

Kecepatan tuntutan reformasi yang belum diikuti dengan regulasi pada awal reformasi menyebabkan praktek ketata-negaraan yang kurang sehat, lembaga legeslatif yang demikian kuatnya justru menyebabkan penyimpangan-penyimpangan, baik di pusat dan di daerah. Penyimpangan-penyimpangan ini dilakukan secara perorangan atau berkempok. Dalam kasus tertentu, penyimpangan dilakukan bersama antara eksekutif dan lembaga legeslatif. Hal ini menimbulkan fenomena, penyimpangan-penyimpangan yang semula terkonsentrasi pada pemerintah pusat merembet ke eksekutif dan lembaga legeslatif daerah. Kajian terhadap fenomena ini perlu dilakukan guna terciptanya pemerintahan dan praktik politik yang lebih bersih.

Dalam proses politik, baik untuk menjadi eksekutif maupun anggota legeslatif yang melalui pilihan langsung oleh rakyat diperlukan sejumlah pengeluaran yang dianggap sebagai biaya total. Biaya total ini terdiri dari beberapa komponen biaya, seperti kontribusi terhadap partai politik, baik dewan pimpinan cabang, dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan pusat. Komponen biaya lainnya bisa berupa biaya tim sukses, biaya sosialisasi dan advertensi serta biaya lain-lain yang belum dapat diidentifikasi. Biaya total anggota politisi, baik eksekutif maupun lembaga legeslatif dapat dinyatakan dengan persamaan

$$TC = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6) \dots \dots \dots (10)$$

- dimana
- TC = Biaya total politisi
 - X = Biaya kontribusi untuk partai
 - X¹ = Biaya tim sukses
 - X² = Biaya sosialisasi calon
 - X³ = Biaya advertensi
 - X⁴ = Harga politisi
 - X⁵ = Biaya lain-lain
 - X₆

Setelah melalui proses pemilihan langsung rakyat dengan mempertimbangkan nomor urut atau suara terbanyak seorang politisi terpilih sebagai eksekutif atau pun anggota legeslatif. Dengan memperhatikan fungsi-fungsi eksekutif, maka dapat disusun model penerimaan total eksekutif sebagai berikut

$$TR = f(X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, \dots) \quad \dots (11)$$

- dimana
- TR = Penerimaan total eksekutif
 - X = Harga politisi
 - X⁵ = Gaji pokok
 - X⁶ = Tunjangan-tunjangan
 - X⁷ = Jumlah regulasi yang dihasilkan
 - X⁸ = Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - X⁹ = Dana Anggaran Khusus
 - X¹⁰ = Variabel dummy daerah
 - X₁₁

Sebagai anggota legeslatif melakukan fungsi anggaran, legeslasi dan pengawasan, sehingga penerimaan total anggota legeslatif dapat dinyatakan

$$TR = f(X_5, X_{12}, X_{13}, X_{14}, X_{15}, X_{16}, X_{17}, \dots) \quad \dots (12)$$

- dimana
- TR = Penerimaan total anggota legeslatif
 - X = Harga politisi
 - X⁵ = Gaji pokok
 - X¹² = Tunjangan-tunjangan
 - X¹³ = Jumlah regulasi yang dihasilkan
 - X¹⁴ = Nilai anggaran Pendapatan Belanja
 - X¹⁵ = Jabatan/ kedudukan anggota legeslatif
 - X¹⁶ = Jumlah kegiatan anggota legeslatif
 - X₁₇

Dengan membandingkan biaya total dengan penerimaan total dapat ditentukan keseimbangan politisi.

AGENDA RISET

Dengan mengacu pada kajian teoritis di atas dan keinginan kuat untuk menjadikan politik sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu dilakukan riset agar politik dapat menjadi panglima pembangunan yang sebenar-benarnya, yaitu politik dapat menyelesaikan masalah, bukan menjadi sumber masalah dalam pembangunan nasional. Agenda riset sebaiknya

Penetapan Harga Seorang Politisi

disusun lintas disiplin keilmuan, selain ilmu politik itu sendiri. Ada baiknya, jika Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang menjadikan topik ini sebagai obyek riset unggulan, sehingga kita bisa berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, L. J. et al., 1998, *Empirical Studies in Institutional Change*, Cambridge University Press, Cambridge. pp. 134-168.
- Coser et al., 1987, *Introduction to Sociology*, 2nd ed., Harcourt Brace Jovanovich, Sandiego. pp. 463-488.
- Sudiyono, A. dan E. Purnomowati, 2006, *Ekonomi Manajerial: Teori dan Hasil-hasil Penelitian*, Program Magister Manajemen Agribisnis PPS Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. pp. 185-205.
- Varian, H. R., 1992, *What Use is Economic Theory*, School of Information Management and Systems. University of California, Berkeley. pp. 1-10.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.